

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata meningkatnya tingkat pendapatan nasional, akan tetapi bagaimana pendapatan itu dapat di distribusikan sehingga semua kalangan masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi tersebut.

Salah satu permasalahan yang menghambat proses pembangunan ekonomi adalah angka pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Di Indonesia tingkat persentase pengangguran cukup tinggi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Pengangguran secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja.

Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak di imbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung lemah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang semakin berkurang dan tidak sebanding untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Kondisi ini juga terjadi pada beberapa daerah yang ada di wilayah Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan nyatanya tidak mampu untuk menyerap banyaknya jumlah tenaga kerja. Jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja justru

berbanding terbalik, artinya setiap peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan jumlah lapangan usaha. Hal ini diperjelas oleh Sadono Sukirno menyatakan bahwa “pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja selanjutnya disebut sebagai pengangguran terbuka”.<sup>1</sup>

Keadaan ini dapat digambarkan dari perkembangan pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara di Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1. Persentase Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Pengangguran Terbuka (%)</b>
2007	10,10
2008	09,10
2009	08,45
2010	07,43
2011	06,37

**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dari tahun-ketahun, dengan rata-rata penurunan pengangguran selama lima tahun adalah sebesar 8,29%. Persentase tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dalam tabel tersebut terjadi pada tahun 2007, dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai 10.10%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tahun 2011 merupakan tahun dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu sebesar 06,37%.

Tingginya angka pengangguran biasanya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia ataupun tingginya kriteria rekrutmen penawaran kesempatan kerja yang ada. Pada kondisi saat ini banyak

---

<sup>1</sup> Sadono Sukirno, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Cetakan 19, Jakarta: PT.RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016, hal. 330

badan usaha yang mencari tenaga kerja dengan syarat utama pada kualifikasi jenjang pendidikan, jenjang pendidikan paling rendah adalah para tenaga kerja yang berada atau merupakan lulusan dari perguruan tinggi dan tidak menggunakan tenaga kerja yang berada pada jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.

Bahkan kondisi ini kemudian di perparah dengan kualifikasi dari *softskill* tenaga kerja yang tidak memadai untuk masuk pada satu bidang lapangan usaha. Kemudian, beberapa lapangan usaha sudah menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin (*employment substitution*) sehingga peranan dari tenaga kerja menjadi tidak efektif.

Jika memperhatikan keadaan-keadaan ini, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pengangguran merupakan salah satu hal yang kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator. Dibalik itu, beberapa hal lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah kondisi ekonomi lainnya, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah pendapatan yang di proksikan dengan upah, serta jumlah angkatan kerja.

Keadaan perekonomian didorong oleh kondisi perekonomian yang stabil, ukuran yang paling mendasar akan hal ini adalah harga-harga dari barang secara umum. Peningkatan dari rata-rata bahan baku secara signifikan dapat diartikan sebagai inflasi. Lebih jelas dapat diketahui bahwa, inflasi merupakan proses kenaikan pada harga-harga barang secara umum. Apabila harga-harga barang secara umum meningkat pada setiap periode, tentu akan berdampak pula pada

kesejahteraan masyarakat, apalagi sebagian besar masyarakat yang memiliki pendapatan kecil tidak mampu untuk memenuhi akan kebutuhan barang secara umum.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai inflasi adalah salah satu topik yang cukup menarik, karena inflasi merupakan indikator ekonomi dan permasalahan umum yang terus menerus dibahas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Boediono dalam I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardikha Natha menjelaskan bahwa:

**Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya.<sup>2</sup>**

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas diketahui bahwa inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang cukup penting, inflasi juga akan mempengaruhi jumlah pengangguran. Pada satu sisi inflasi akan mendorong jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja akibat dari akumulasi tingkat pendapatan yang juga rendah. Berikut ini Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan laju inflasi Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

**Tabel. 1.2 Laju Inflasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011.**

<b>Tahun</b>	<b>Inflasi (%)</b>
2007	6,6
2008	10,72
2009	2,61
2010	8,00
2011	3,67

**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>2</sup> I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardikha Natha, **Pengaruh Inflasi, Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali, E-Jurnal EP UNUD , Vol.4, No.8, Agustus 2015, hal.929

Jika dilihat pada Tabel 1.2 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi dari tingkat inflasi pada tahun 2007 sebesar 6,6% naik signifikan di tahun 2008 sebesar 10,72%. Kemudian tingkat inflasi terendah terjadi di tahun 2009 sebesar 2,61%. Sementara selama lima tahun, rata-rata dari perubahan inflasi adalah sebesar 31,6%.

Selain dari inflasi, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses mantap di mana kemampuan produksi meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menaikkan tingkat pendapatan nasional (*national income*).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator terhadap pemerataan pembangunan. Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah”.<sup>3</sup> Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran merupakan masalah makroekonomi utama yang dihadapi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB) dengan pengangguran, jika terjadi peningkatan output nasional/daerah dalam hal ini pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran turun.

Sebaliknya jika PDB riil turun maka akan menyebabkan output yang diproduksi turun. Turunnya produksi mengakibatkan produsen mengurangi kapasitas produksi dan memaksa produsen mengurangi input dalam hal ini tenaga

---

<sup>3</sup> Sadono Sukirno **Op.Cit**, hal. 9

kerja yang akhirnya pengangguran meningkat. Dibawah ini kita bisa mengetahui laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011 pada Tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007-2011.**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2007	6,90
2008	6,39
2009	5,07
2010	6,42
2011	6,63

**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera utara yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang paling rendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,07%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,90%, untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah sebesar 6,282%.

Selanjutnya dalam ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara adalah masalah upah. Dimana upah mempunyai dampak secara langsung pada tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini. Hal tersebut disebabkan karena penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki kesejahteraan pekerja, menerapkan kebijakan upah yaitu dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Berikut ini perkembangan UMP Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2007-2011. Dapat kita lihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2011**

<b>Tahun</b>	<b>UMP (Rupiah)</b>
2007	761.000
2008	822.205
2009	905.000
2010	965.000
2011	1.035.500

**Sumber** : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dari Tabel 1.4 menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Laju perkembangan besaran UMP yang paling rendah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.761.000; Sedangkan laju perkembangan besaran UMP tertinggi sebesar Rp.1.035.500; pada tahun 2011. Untuk rata-rata perubahan UMP selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp.897.741;.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan upah minimum mengalami kenaikan hingga tahun 2011, melalui peningkatan upah tersebut diharapkan kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Indikator yang menjadi masalah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara adalah pesatnya pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan kenaikan. Dimulai pada tahun 2010 sebesar 12.982.204 jiwa sampai pada tahun 2014 sebesar 13.766.851 jiwa (BPS, 2010 dan 2014).

Kenaikan jumlah penduduk ini juga diikuti oleh jumlah angkatan kerja yang meningkat pula, akibatnya pengangguran pun meningkat, hal ini disebabkan jumlah lapangan kerja yang tidak diimbangi oleh pesatnya pertumbuhan angkatan kerja. Secara sederhana angkatan kerja dapat diartikan sebagai seseorang yang masuk kedalam usia yang siap untuk bekerja dalam hal ini seseorang yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Berikut ini jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan Provinsi Sumatera Utara yang digolongkan sebagai usia angkatan kerja. Dapat kita lihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

**Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2012**

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)		Total (Jiwa)
	Bekerja	Sedang Mencari Pekerjaan	
2007	5.082.797	571.334	5.654.131
2008	5.540.263	554.539	6.094.802
2009	5.765.643	532.427	6.298.070
2010	6.125.571	491.806	6.617.377
2011	5.912.114	402.125	6.314.239

**Sumber:** BPS Provinsi Sumatera Utara



Jika melihat Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwasanya jumlah angkatan kerja menurut jenis kegiatan lima tahun dimulai tahun 2007 sampai 2011 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja tertinggi Provinsi Sumatera Utara yakni pada tahun 2010 sebesar 6.617.377 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja paling rendah pada tahun 2008 sebesar 5.654.131 jiwa. Dengan rata-rata perubahan setiap tahun dimulai tahun 2007-2011 yaitu sebesar 6.195.723 jiwa.

Perubahan jumlah angkatan kerja ini dipengaruhi banyak faktor diantaranya populasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Kemudian juga tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi salah satu masalah dimana banyak usia angkatan kerja yang tidak terserap di provinsi Sumatera Utara oleh karena kualifikasi pendidikan menjadi syarat penting untuk bisa bekerja.

Kualifikasi pendidikan ini menjadi salah satu tolak ukur yang penting untuk dapat menyerap tenaga kerja. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap, maka pengangguran juga akan semakin berkurang, namun apabila tenaga kerja yang terserap semakin sedikit maka jumlah pengangguran juga akan semakin meningkat.

Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur sosio-ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran. Pengendalian variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah

minimum provinsi dan jumlah angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kondisi perekonomian secara menyeluruh (*apresiasi agregate economics*).

Berdasarkan penjelasan akan permasalahan perekonomian di atas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam topik terkait dan mengangkatnya menjadi penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas ada empat hal yang perlu dikaji dalam penelitian ini dan dirumuskan sebagai rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017 ?
3. Bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017 ?
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan secara Praktis

Memberi informasi dan bahan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dalam mengurangi jumlah pengangguran sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan sebuah akibat dari tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan dipasar tenaga kerja. Dimana salah satu sisi (permintaan/penawaran) lebih besar dari pada sisi lain yang berakibat tidak terserapnya beberapa sumber daya potensial. Fenomena besar kecilnya pengangguran disuatu daerah tidak lepas dari kesehatan perekonomian dan kualitas pendidikan masyarakat didaerah tersebut dimana kesehatan perekonomian merupakan terjadinya distribusi normal pendapatan di masyarakat yang memangkas jurang kesenjangan pendapatan dan investasi pendidikan yang akan menjadi modal awal menghadapi dunia kerja.

Sukirno dalam Mohammad Rifqi Muslim menjelaskan bahwa Pengangguran diartikan sebagai berikut :

**Seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur.**<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Rifqi Muslim, **Pengangguran Terbuka Dan Determinannya**, Institute Of Public Policy And Economic Studies (Inspect) Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, Oktober 2014, hal. 172

### **2.1.1 Jenis Jenis Pengangguran**

Menurut Sukirno sebagaimana dikutip oleh Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri menjelaskan pengangguran dapat digolongkan berdasarkan cirinya, yaitu :

- 1. Pengangguran Tersembunyi, dapat terjadi apabila penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi.**
- 2. Pengangguran Musiman, terjadi karena adanya pergantian musim biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian.**
- 3. Setengah Menganggur, terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah, sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu.**
- 4. Pengangguran Terbuka, terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.<sup>5</sup>**

### **2.1.2. Defenisi Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. “Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai

---

<sup>5</sup> Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Jurnal Ekonomi Terapan, Volume 1, Nomor 02, Juni 2017, hal 3

akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.”<sup>6</sup> Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan rumus berikut ini :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

## 2.2. Teori Inflasi

Menurut Suparmoko: “Inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.”<sup>7</sup> Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam periode waktu tertentu. Dalam perekonomian sering kali besarnya tingkat inflasi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun, inflasi ini tergolong inflasi dalam inflasi merayap. Sering kali inflasi yang terjadi lebih serius, yang besarnya antara 5 hingga 10 persen per tahun. Dalam keadaan tertentu, inflasi juga dapat mencapai ratusan bahkan ribuan persen pertahun sebagai akibat resesi ekonomi atau sebab-sebab lain, inflasi ini tergolong dalam inflasi hiper.

Inflasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu periode dimana kekuatan membeli satuan moneter menurun atau terjadi kenaikan harga dan sebagian besar barang dan jasa (secara umum) secara terus menerus. Jika kenaikan barang dan jasa hanya satu atau beberapa macam maka tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, begitu juga kenaikan barang dan jasa yang bersifat kejutan (sekali waktu musim) pada hari Raya Islam dan Natal juga tidak dapat dinamakan dengan inflasi.

---

<sup>6</sup> Sadono Sukirno, **op.cit** hal 330

<sup>7</sup> M. Suparmoko dan Eleonora Sofilda, **Pengantar Ekonomi Makro**, Edisi 5, Tangerang, In Media, 2014, hal, 185

Sedangkan inflasi dalam arti luas didefinisikan sebagaimana kenaikan relatif dan sekonyong-konyong yang disporposional besar dalam tingkat harga umum. Inflasi dapat timbul bila jumlah uang atau uang deposito (*Deposite Currency*) dalam peredaran banyak, dibandingkan dengan jumlah barang-barang serta jasa-jasa yang ditawarkan atau bila karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang nasional, terdapat adanya gejala yang meluas untuk menukar dengan barang-barang. Suatu kenaikan normal dalam tingkat harga setelah suatu periode depresi umumnya tidak dianggap sebagai kenaikan inflasi.

### **2.2.1. Jenis Jenis Inflasi**

Menurut Suparmoko Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Inflasi berdasakan atas drajat parah tidaknya dibagi menjadi :**
  - 1. Inflasi ringan (dibawah 10% per tahun)**
  - 2. Inflasi sedang (antara 10%-30% per tahun)**
  - 3. Inflasi tinggi (antara 30%-100% per tahun)**
  - 4. Hyperinflation (diatas 100% per tahun)**
- b. Berdasarkan faktor yang menimbulkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis :**
  - 1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*), ialah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit (*Deficit Financing*).**
  - 2. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*), ialah inflasi yang ditimbulkan oleh desakan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh. Dengan organisasi buruh yang kuat, para pekerja bersatu menuntut kenaikan upah, dan bila pihak pengelola perusahaan mengabulkannya maka upah buruh dinaikkan.<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup> **Ibid** Hal 189-192

### 2.2.2 Cara Mengatasi Inflasi

Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa :

#### 1. Kebijakan Moneter

Kebijakan penetapan persediaan kas : Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan cara menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank umum. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Berikut beberapa kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank Indonesia utk menekan laju inflasi:

- a. Kebijakan Diskonto : untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.
- b. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka : melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang



terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi.

- c. Kebijakan Rasio Cadangan Wajib : rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya untuk menaikkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

## 2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi permintaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat memengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Menghemat pengeluaran pemerintah : pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran, sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga.
- b. Menaikkan tarif pajak : untuk menekan inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak. Naiknya tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga harga dapat turun.

### 3. Kebijakan lain diluar kebijakan moneter dan fiskal

Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain moneter dan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar:  
untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan produksi. Hal ini dapat ditempuh, misalnya dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya, dengan menurunkan bea masuk barang impor.
- b. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang :  
penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realitas. Kalau penetapan itu tidak realitas, dapat berakibat terjadi pasar gelap (*black market*)

### 2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono sukirno dalam Eko Wicaksono Pambudi dan dan Miyasto menjelaskan bahwa, “Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat”.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Sukirno Menurut Lincolin dalam Eko Wicaksono Pambudi dan Miyasto menjelaskan bahwa: “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak”.<sup>10</sup>

### **2.3.1. Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno dua hal penting yang dibicarakan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: satu, “Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dua, Teori- teori yang menerangkan faktor penting yang menentukan pertumbuhan.”<sup>11</sup>

Evolusi teori pertumbuhan ekonomi dimulai dari teori-teori pertumbuhan linear yang diungkapkan oleh Adam Smith, Karl Marx, dan Rostow. Pada masa ini melihat pertumbuhan ekonomi terbatas karena adanya sifat kelangkaan pada sumber daya alam dan kemiskinan para pekerja. Pada awalnya, ekonom sebelum Adam Smith melihat dunia dalam hubungan statis.

Kemakmuran hanya diartikan dengan meng-akumulasikan emas dan perak dan peran negara adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam-logam

---

<sup>9</sup> Eko Wicaksono Pambudi dan dan Miyasto, “**Analisis Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**”, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Diponegoro Journal Of Economics, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hal. 1

<sup>10</sup> **Loc.Cit**

<sup>11</sup> Sadono sukirno, **Op.Cit**, hal 422

mulia. Adam Smith tidak setuju dengan pemikiran yang statis tersebut. Dia menganggap kemakmuran negara diperoleh dari kemampuannya untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan tingkat produksi yang lebih baik dengan menekankan adanya spesialisasi individu dan pembagian kerja.

Pasca teori pertumbuhan linear, banyak teori menekan adanya perubahan struktural. Lewis melalui Teori Model Surplus Tenaga Kerja membagi ekonomi ke dalam dua kategori, yaitu sektor yang subsisten dan kapitalis. Sektor yang subsisten adalah sektor pertanian di mana produksi pangan dikonsumsi sebagian besar oleh petani itu sendiri.

Titik lemah sektor ini yaitu penggunaan teknologi yang sederhana dan modal yang relatif minim. Sektor kapitalis adalah sektor-sektor modern yang umumnya ditopang oleh sektor industri. Proses pembangunan dimulai ketika perpindahan sektor subsisten menuju sektor-sektor modern. Kapitalis akan memperluas investasi guna meningkatkan jumlah pekerja dan tingkat produksi.

Teori neo-klasik mencuatkan dua model yang terkenal, yaitu teori pertumbuhan Harrod-Domar dan Solow. Analisis pada masa ini dengan mengidentifikasi investasi dan pertumbuhan yang kokoh melalui MPS (*Marginal Propensity to Save*) dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). MPS merupakan rasio perubahan tabungan karena adanya perubahan pendapatan,

$\Delta S/\Delta Y$ , sedangkan ICOR adalah rasio yang menunjukkan berapa tambahan stok modal yang dibutuhkan untuk memproduksi produksi sebesar satu dolar,  $\Delta K/\Delta Y$ .

Terakhir muncul teori-teori baru seperti teori pertumbuhan baru (*New Growth Theory*- NGT), Teori Geografi Ekonomi Baru (*New Economic Geography*-NEG) dan Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory* –NTT). Teori NGT yang dikemukakan oleh Paul Romer merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan neo-klasik. Romer menambahkan variabel teknologi ke dalam model Solow, bukan sebagai variabel di luar model.

Oleh karena itu, kemampuan pengembangan teknologi dan pengetahuan merupakan hal yang krusial dalam menciptakan pertumbuhan. Romer mengungkapkan bahwa ide merupakan barang ekonomi yang jauh lebih penting daripada tujuan yang dititikberatkan dalam banyak model ekonomi. Ide memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dalam dunia yang penuh dengan keterbatasan fisik

## 2.4 Teori Upah

Dalam teori ekonomi mikro Sukirno menjelaskan bahwa: Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha”.<sup>12</sup>

Salah satu faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi

---

<sup>12</sup> Sadono Sukirno, **Mikroekonomi Teori Pengantar**, Edisi 3, Cetakan 25, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hal. 351

sehingga menghasilkan output yang diinginkan perusahaan. Adanya pengorbanan yang dikeluarkan tenaga kerja untuk perusahaan maka tenaga kerja berhak atas balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut berupa upah. Ahli ekonomi membuat perbedaan di antara dua pengertian upah yaitu :

1. **Upah Uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.**
2. **Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.**<sup>13</sup>

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 30 menyebutkan bahwa:

**Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.**<sup>14</sup>

#### **2.4.1. Defenisi Upah Minimum**

Upah minimum di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Definisi upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Selanjutnya upah minimum dibagi menjadi dua yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Situasi per-buruhan yang

---

<sup>13</sup> **Loc.cit**

<sup>14</sup> Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

sifat dan dinamikanya semakin kompleks di Indonesia, mengharuskan pemerintah mengatur upah minimum.

Retno wilis mengatakan bahwa: “Tujuan pertama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat penawaran tingkat tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan”.<sup>15</sup>

Dasar kebijakan upah minimum diatur dalam pasal 3 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, yaitu penetapan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum cenderung meningkat setiap tahun seiring naiknya upah minimum kesejahteraan (upah riil).

Kenaikan Upah Minimum akan mengurangi pengangguran karena kenaikan upah akan mempengaruhi penduduk untuk bekerja atau dengan kata lain penduduk usia angkatan kerja akan semakin giat utk mencari kerja dan yang sudah bekerja akan memperoleh imbalan atau upah minimum yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disamping itu kenaikan upah minimum akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang semakin menurun karena diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan.

Namun di sisi lain kenaikan upah minimum provinsi menyebabkan dilema bagi perusahaan, karena di satu sisi harus memenuhi peraturan pengupahan yang

---

<sup>15</sup> Retno Wilis, **Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan**, Banyuwangi, Jurnal Badan Pengolahan Keuangasn dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, vol 3, No 1, 2015, hal 14

telah diatur pemerintah, namun disisi lain permasalahan *labor cost* dirasakan menjadi berat terutama bagi industri padat karya dan industri kecil menengah.

Upah minimum memiliki efek buruk pada pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran, ketika undang-undang upah minimum diberlakukan, pengangguran akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena upah menjadi mahal daripada apa yang mereka anggarkan sebelumnya.

## **2.5. Teori Angkatan Kerja**

### **2.5.1. Ketenagakerjaan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”<sup>16</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, sedangkan penduduk berumur dibawah 15 tahun digolongkan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi.

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.



Dalam hal ini sumberdaya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumberdaya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja.<sup>17</sup>**

Berdasarkan gagasan Plato, dalam sebuah negara ideal, kemajuan berdasarkan pada pembagian kerja (*division of labor*) yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Orang mempunyai sifat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan sendirinya pun bidang pekerjaan yang diminati setiap orang juga berbeda. Pandangan tersebut mirip dengan pandangan Adam Smith tentang pembagian kerja (*division of labor*). Perbedaannya adalah, pembagian kerja menurut Smith dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan output, sedangkan pembagian kerja menurut Plato adalah untuk pembangunan kualitas manusia.

Menurut Mulyadi.S ada beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yaitu:

#### **1. Tenaga Kerja (*Man Power*)**

**Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap**

---

<sup>17</sup> Arfida BR, **Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 19

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

**2. Angkatan Kerja (*Labor Force*)**

Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa.

**3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*)**

Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100 \%$$

**4. Tingkat Pengangguran (*Unemployment Rate*)**

Adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

$$P = \frac{\text{Jumlah Orang Yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

**5. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)**

Pengangguran terbuka atau pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

**6. Setengah Menganggur (*Underemployment*)**

Adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.

**7. Setengah Menganggur yang Kentara (*Visible Underemployment*)**

Adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*Part Time*) diluar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

**8. Setengah Menganggur yang tidak Kentara (*Insible Underemployment*)**

Adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaanya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

**9. Pengangguran Tidak Kentara (*Disguised Unemployment*)**

Dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat segi produktifitasnya.

**10. Pengangguran Friksional (*Unemployment Frictional*)**

Adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus

mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

#### **11. Pengangguran Struktur (*Unemployment Structural*)**

Adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.<sup>18</sup>

### **2.5.2 Permintaan Tenaga Kerja**

Menurut Afrida “Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah (yang dilihat dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan”.<sup>19</sup> Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil output. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin kecil permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja.

Permintaan produsen atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli, sedangkan pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya.

Permintaan akan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand*. Pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang

---

<sup>18</sup> Mulyadi S. **Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan**, Edisi Revisi, Cetakan Ke Lima, Jakarta Rajawali Pers. 2014, hal. 71-73

<sup>19</sup> BR Afrida, **Op.Cit** hal 42

dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu.

### **2.5.3. Penawaran Tenaga Kerja**

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya.

Menurut Afrida “Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan”.<sup>20</sup> Contohnya, apabila upah sebagai programmer komputer naik relatif lebih tinggi dari upah jenis jabatan lain (karena kebutuhan yang meningkat), maka dapat diduga bahwa tendensi untuk menjadi progamer akan meningkat pula.

Sebelumnya penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Keputusan ini juga tergantung pula pada tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah digunakan untuk bekerja, apakah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih santai (tidak produktif tetapi konsumtif) atau merupakan kombinasi keduanya.

Apabila dikaitkan dengan tingkat upah maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Maksudnya apabila penghasilan tenaga kerja relatif cukup tinggi, maka tenaga

---

<sup>20</sup> BR Afrida, **Op.Cit** hal 64

kerja tersebut cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja.

#### **2.5.4 Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diserap oleh perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sonny faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah:

##### **1. Perubahan Tingkat Upah**

**Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:**

- a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan harga perunit yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi akan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya pengaruh skala produksi yang disebut dengan efek skala produksi atau scale effect product.**
- b. Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah) maka pengusaha akan lebih suka dengan menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin ini disebut efek substitusi atau substitution effect.**

##### **2. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja**

- a. Naik turunnya permintaan akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.**
- b. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual per unit barang akan turun pada keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan**

**tambah besar. Disamping itu permintaan tenaga kerja akan bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan.<sup>21</sup>**

#### **2.5.5. Perluasan Kesempatan Kerja**

Menurut Sumarsono “kebijakan perluasan kesempatan kerja erat hubungannya dengan kebijaksanaan kependudukan. Secara umum penyediaan (penawaran) tenaga kerja suatu negara atau dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk, tenaga kerja, pendidikan, perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya”.<sup>22</sup> Jumlah penduduk yang melimpah akan menyediakan angkatan kerja yang banyak pula.

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yaitu perlunya penciptaan atau perluasan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja mengandung pengertian besarnya kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan kata lain kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan semua lapangan pekerjaan.

Kesempatan kerja yang ada merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena kesempatan kerja akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan nonekonomi masyarakat. Adanya kesempatan kerja yang terbuka lebar dapat dijadikan sebagai usaha dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>21</sup> Sonny Sumarsono, **Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan**, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha ilmu, 2003, hal. 106

<sup>22</sup> **Ibid** hal 41

### **2.5.6. Status Pekerjaan**

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha dan menunjukkan tingkat kegiatan yang dilakukannya. Menurut Basir Barthos status pekerjaan dibagi dalam tujuh kelompok yaitu :

- a. Buruh atau karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor perusahaan dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang, seperti pegawai negeri/swasta, buruh tani dan sebagainya.**
- b. Berusaha sendiri adalah seseorang yang melakukan pekerjaan /usaha atau resiko/tanggungannya sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain, baik oleh anggota rumah tangganya atau buruh lain.**
- c. Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga atau buruh tidak tetap adalah seseorang yang melaksanakan usaha atas resiko sendiri dan dalam usahanya itu mempekerjakan pekerja keluarga atau buruh tidak tetap.**
- d. Berusaha dengan dibantu buruh/karyawan tetap adalah seseorang yang melaksanakan usaha atau resiko sendiri dari dalam usahanya itu mempekerjakan paling sedikit satu buruh tetap.**
- e. Pengusaha dengan bantuan orang lain adalah seseorang yang melakukan pekerjaan/usaha dengan dibantu oleh satu atau beberapa orang baik anggota rumah tangga lainnya maupun buruh yang dibayar seperti pemilik toko, warung atau restoran yang dibantu satu atau beberapa orang, petani yang mengusahakan tanahnya dengan dibantu oleh anggota rumah tangga lainnya dan sebagainya.**
- f. Pekerjaan keluarga tanpa upah adalah anggota rumah tangga yang membantu usaha yang dilakukan oleh salah satu (seseorang) anggota rumah tangga lainnya tanpa mendapatkan upah seperti, istri yang membantu suaminya di toko, disawah dan sebagainya.**
- g. Pekerja sosial adalah mereka yang bekerja tanpa mendapatkan upah/gaji baik berupa uang maupun barang dengan tujuan sosial, seperti orang-orang yang bekerja mengurus kegiatan sosial, seperti bencana alam, anak yatim piatu dan sebagainya.<sup>23</sup>**

---

<sup>23</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Edisi Pertama, Cetakan 7, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hal, 19-20

### 2.5.7. Klasifikasi Tenaga Kerja

#### 1. Angkatan kerja

Menurut Basir Barthos “Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang bekerja, sementara tidak bekerja, dan sedang mencari pekerjaan.”<sup>24</sup>

Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Peraturan di Indonesia penduduk usia memasuki usia kerja adalah 15 tahun atau lebih, tetapi tidak semua usia kerja masuk dalam angkatan kerja.

Pelajar, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga adalah beberapa contoh golongan yang tidak masuk angkatan kerja. Penduduk yang masuk dalam golongan angkatan kerja adalah golongan yang berperan aktif dalam menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi. Selain itu orang yang menganggur, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang sewaktu-waktu siap bekerja juga masuk dalam angkatan kerja.

#### 2. Bukan angkatan kerja

Menurut Basir Barthos “bukan angkatan kerja adalah penduduk yang terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga, murid atau mahasiswa, penerima pendapatan dan lain-lain.”<sup>25</sup> Golongan orang yang sekolah adalah mereka yang hanya bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang bertugas mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, sedangkan golongan lainnya adalah dua macam, yaitu golongan yang penerima pendapatan dan golongan orang yang tergantung oleh orang lain.

---

<sup>24</sup> **Ibid**, hal, 17

<sup>25</sup> **Ibid**, hal,18



Golongan penerima pendapatan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi menerima pendapatan baik tunjangan pensiun, bunga bank, dan sebagainya. Sedangkan golongan orang yang tergantung orang lain adalah orang yang sudah memasuki usia tua atau orang yang mengalami cacat. Golongan-golongan yang termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk berkerja. Oleh sebab itu golongan ini sering disebut dengan *Potensial Labour Force* (PLC). Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

## 2.6 Hubungan Antara Inflasi dengan Pengangguran

Sukirno menjelaskan dalam skripsi Asnidar sifat keterkaitan hubungan inflasi dengan pengangguran bahwa :

**Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi**<sup>26</sup>

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat

---

<sup>26</sup> Asnidar, **Analisis Pengaruh Inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Pengangguran di Provinsi Aceh**, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, Tahun 2016, hal.25-26 ( tidak diterbitkan )

pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen.

Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (trade off) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

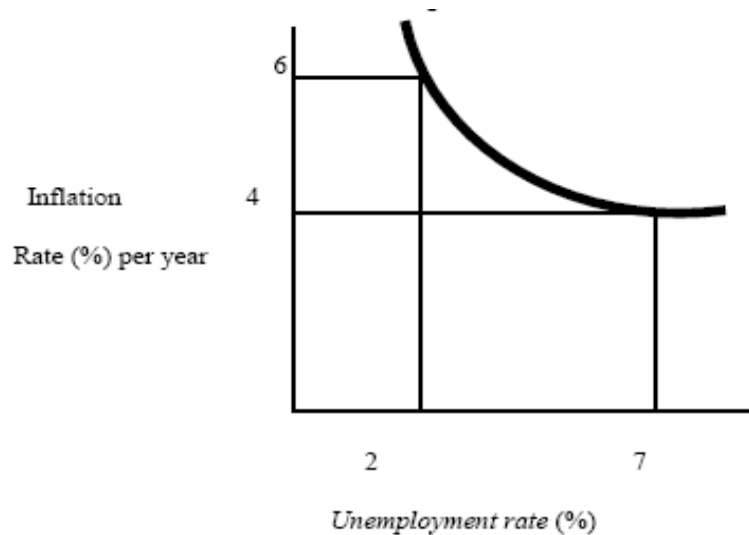
Hubungan antara inflasi dan pengangguran mulai menarik perhatian para ekonom pada akhir tahun 1950an, ketika A.W. Phillips dalam tulisannya dengan judul "*The Relationship Between Unemployment and The Rate of Change of Money Wage Rate in the United Kingdom*" yang dimuat pada jurnal *Economica*, menunjukkan adanya hubungan negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran (yang kemudian dikenal dengan nama kurva Phillips).

Penelitian Phillips yang menggunakan data laju perubahan upah dan pengangguran di Inggris selama tahun 1861-1913, menunjukkan bahwa jika terjadi inflasi yang tercermin dari kenaikan tingkat upah yang tinggi akan dapat menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi akan disertai dengan menurunnya tingkat upah (upah menjadi rendah).

### **2.6.1. Kurva Philips**

Hubungan terbalik (tradeoff) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan

inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi.



**Gambar 2.1. Kurva Philips**

**Sumber :** Jurnal Ilmiah: Cahyadi Kurniawan (2013)

Dari gambar kurva A.W. Phillips diatas yang dikutip dalam Roby Cahyadi Kurniawan menjelaskan bahwa kurva philips diatas menjelaskan :

**Bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.**<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Roby Cahyadi Kurniawan, **Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Malang Tahun 1980-2011**, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah, Januari 2013, hal. 9

## 2.7 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan perhatian dari pembuat kebijakan. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

### 2.7.1 Hukum Okun

Okun dalam Darman menyatakan bahwa “untuk setiap 2 persen kemerosotan GNP dari GNP potensialnya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen. Jadi apabila GNP semula 100 persen dari potensial dan kemudian menjadi 98 persen, maka tingkat pengangguran melonjak dari 6 % ke 7 %.”<sup>28</sup>

Sinclair dalam Darman menyatakan koefisien Okun merupakan salah satu komponen penting yang dikaji para ekonom dalam menganalisis hukum Okun untuk beberapa alasan diantaranya sebagai berikut :

**Pertama, jika tingkat pengangguran merupakan variabel kebijakan, maka koefisien Okun dapat diinterpretasikan sebagai besaran target perekonomian untuk mereduksi tingkat pengangguran. Kedua, peramalan output sering dibuat untuk menyatakan peramalan dari tingkat pengangguran. Ketiga, koefisien Okun sangat berguna untuk**

---

<sup>28</sup> Darman, **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran (Analisis Hukum Okun)**, Management Departement Binus University, Jakarta, Jurnal The Winners, vol.14, No. 1, tahun 2013, hal.1

**mengetahui kapan output berada diatas atau dibawah nilai potensialnya.<sup>29</sup>**

Arthur Okun, salah seorang anggota dewan penasehat ekonomi Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Kennedy, menduga dan berusaha meyakinkan para pembuat kebijakan mengenai biaya sangat tinggi dari output terhadap pengangguran. Okun menyampaikan argumen tersebut dengan menggunakan "*three methods of relating output to the employment rate*".

Okun dalam artikelnya menyajikan dua hubungan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan output riil, yang kemudian dikenal menjadi Hukum Okun. Kedua hubungan Okun muncul dari pengamatan dimana lebih banyak tenaga kerja biasanya diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lebih banyak tenaga kerja bisa diartikan dalam berbagai bentuk, seperti memiliki karyawan yang bekerja lebih lama atau merekrut lebih banyak pekerja.

Untuk menyederhanakan analisis, Okun mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran dapat berfungsi sebagai pengganti variabel dari jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian. Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan output dan perubahan dalam pengangguran yaitu, bagaimana output tumbuh bervariasi secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran.

Reinhard Simare mare menjelaskan dalam skripsinya tentang penerapan Hukum Okun di Indonesia yaitu:

---

<sup>29</sup> Loc.cit

**Penerapan hukum Okun terhadap Indonesia dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan output dan tingkat pengangguran di Indonesia. Peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tingkat pengangguran atau pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Hukum Okun dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai target tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja atau berkurangnya tingkat pengangguran merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia saat ini.<sup>30</sup>**

## **2.8. Hubungan antara Upah Minimum Provinsi dengan Pengangguran**

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kenaikan upah minimum setiap tahunnya mengalami peningkatan, melalui peningkatan upah tersebut diharapkan kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak.

Kenaikan Upah ini juga telah memberikan dampak secara langsung bagi penduduk usia angkatan kerja untuk segera bekerja karena alasan upah yang tinggi

---

<sup>30</sup> Reinhard Januar Simare mare, **Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia: Aplikasi Hukum Okun**, Ilmu Ekonomi Fakultas ekonomi dan manajemen, Institut Pertanian Bogor, Tahun 2006, hal. 2 ( tidak diterbitkan )

maka setiap unit angkatan kerja akan semakin giat dalam bekerja maupun mencari pekerjaan guna meningkatkan taraf kesejahteraannya. Sesuai tujuan dari penetapan UMP untuk meningkatkan kesejahteraan setiap unit tenaga kerja pada kondisi jumlah tenaga kerja yang banyak. Sesuai dengan kondisi ini maka pengangguran akan berkurang. Philips dalam Tesis Mochammad Rizqal menjelaskan sifat keterkaitan antara tingkat upah dengan pengangguran yaitu :

- 1. Apabila tingkat pengangguran semakin rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan penurunan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai posisi kuat dalam *bargaining* upah karena perusahaan tidak mau kehilangan faktor produksi yang dimiliki maka balas jasa tenaga kerja akan meningkat.**
- 2. Apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah relatif lambat berlakunya. Dalam kondisi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Posisi tenaga kerja lemah karena tingkat penawaran tenaga kerja yang melimpah. Perusahaan dengan mudah mendapatkan tenaga kerja pengganti apabila pekerja menuntut kenaikan upah. Namun, pihak perusahaan juga tidak mau kehilangan tenaga kerja berpengalaman sehingga tidak bisa serta merta memecat tenaga kerjanya.<sup>31</sup>**

## **2.9. Hubungan Antara Jumlah Angkatan Kerja dengan Pengangguran**

Sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia tingkat kemakmuran Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya sangat beragam dan kompleks. Namun, salah satu penyebab utamanya adalah tenaga kerja yang walaupun jumlahnya banyak, masih kurang berdaya guna.

Indonesia, salah satu negara terpadat di dunia, menduduki peringkat ke empat populasi tertinggi setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah

---

<sup>31</sup> Mochammad Rizqal, **Analisis Hubungan Simultan Antara Tingkat Upah Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Variabel Yang Mempengaruhinya**, Tesis S-2 Program Studi Ilmu Ekonomi, Sekolah Pasca Sarjana Institute Pertanian Bogor, Tahun 2010, hal. 25 (tidak diterbitkan)

penduduk di Indonesia yang besar mencapai hampir 211 juta nyatanya tidak mampu memberikan dampak output yang besar (tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi).

Jumlah penduduk yang besar telah memberikan keuntungan terhadap penyediaan angkatan kerja yang melimpah pula. Angkatan kerja diartikan sebagai mereka yang bekerja, tidak bekerja, dan mencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Hubungan antara angkatan kerja dijelaskan mempunyai hubungan yang positif dengan pengangguran. Dengan kata lain jumlah penduduk yang banyak diikuti angkatan kerja yang melimpah baik itu angkatan kerja berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan maupun kualifikasi berdasarkan spesialisasi tenaga kerja tidak diikuti oleh tersedianya kesempatan kerja. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Pangastuti dalam Selly Ollyviana mengatakan bahwa:

**Variabel angkatan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengangguran. Dari hasil estimasi persamaan regresi selama tahun pengamatan tahun 2008-2012 menunjukkan besaran koefisien 2,480002 yang berarti ketika semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja sebesar 2,480002 % per tahun di provinsi jawa tengah. Pengangguran meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pergeseran struktur perekonomian. Pengaruh pengangguran meningkat disebabkan ketersediaan kesempatan kerja yang tidak memadai sesuai dengan kriteria pencari kerja.**<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Selly Ollyviana, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja Yang Bekerja, Tamatan SLTA Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Jawa Tengah Tahun 2014”, Jurusan Matematika Fakultas Matematika Dan Ipa, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016, hal. 22 ( tidak diterbitkan )



Selain populasi pertumbuhan penduduk yang tinggi yang diikuti jumlah angkatan kerja yang banyak. Hal lain yang menjelaskan hubungan antara jumlah angkatan kerja kita yang tidak terserap sehingga mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran adalah tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah dan juga pemerintah yang cenderung mengandalkan sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan sektor industri yang jauh lebih besar untuk menyerap angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya besar.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Shun Hajji dan Nugroho SBM pada tahun 2013 dengan judul “Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011”. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

**PDRB tidak berpengaruh pada besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,241 dengan probabilitas 0,567. Berarti pertumbuhan PDRB tidak akan mempengaruhi TPT di Jawa Tengah. Pengaruh Inflasi terhadap TPT bernilai positif dan tidak signifikan, artinya inflasi di Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan, UMP dan AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini dapat dimengerti mengingat tingkat upah yang ditetapkan pemerintah di atas keseimbangan pasar dirasa sangat membebani perusahaan dalam biaya produksinya, dan kualitas pendidikan yang tinggi membuat masyarakat Jawa Tengah enggan bekerja pada tingkat**

**upah yang mereka rasa kurang sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses menempuh pendidikan.<sup>33</sup>**

Selanjutnya, Pada tahun 2014, penelitian dilakukan dalam Cita Ekonomika yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Ambon”. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode OLS. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa :

**Tingkat pengangguran di Kota Ambon dipengaruhi oleh tingkat inflasi, apabila inflasi itu naik sebesar 1% maka jumlah pengangguran meningkat sebesar 8,925618. Tingkat pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan yang berkebalikan, apabila pertumbuhan ekonomi itu naik, maka tingkat pengangguran akan turun dan sebaliknya.<sup>34</sup>**

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti dan Arnah Ritonga pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014”. Dengan Metode Ordinary Least Square”. Model analisis yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :

**Angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dimana ketika jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 3,059904%. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. dimana ketika inflasi mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,020060%. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1% maka**

---

<sup>33</sup> Shun Hajji dan Nugroho SBM, “Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011”, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan IESP, Universitas Diponegoro, Jurnal Of Economics, Vol.2, No.3, Tahun 2013, hal.8

<sup>34</sup> Cita Ekonomika, **Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Ambon**, Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Jurnal Ekonomi, Vol.8, No.1, Mei 2014

akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran sebesar 3,105293%. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dimana ketika upah minimum mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran sebesar 1,003877%. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dimana ketika tingkat pendidikan mengalami kenaikan 1% maka akan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,282733%.<sup>35</sup>

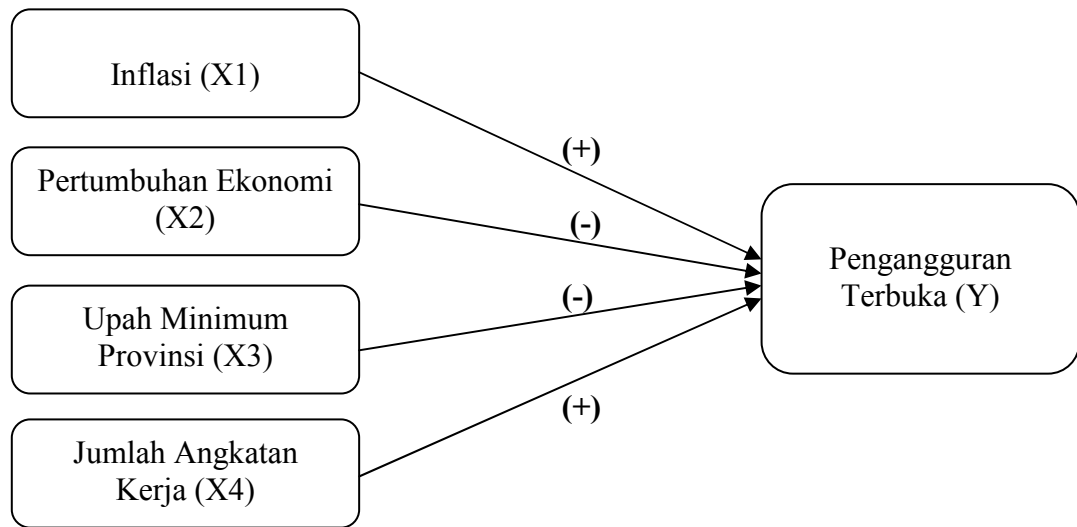
## 2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa jumlah pengangguran terbuka tidak terlepas dari pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah dan jumlah angkatan kerja. Variabel-variabel tersebut kemudian akan diukur dengan alat analisis regresi agar diketahui tingkat signifikasinya.

Apabila telah didapat hasil dari regresi tersebut kemudian dapat dilihat tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya yaitu Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017. Kemudian setelah didapat tingkat signifikansi setiap variabel independen, diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai mengatasi pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Secara sederhana hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Isnayanti dan Arnah Ritonga, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1978-2014 Dengan Metode Ordinary Least Square” Medan : Fakultas Matematika dan Ipa, Universitas Negeri, Jurnal Karismatika, Vol.3, No.2, Agustus 2017, Hal.196



**Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual**

### 2.12 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2017
- b. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2017
- c. Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2017
- d. Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2017

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di provinsi Sumatera utara, dengan menganalisis pengaruh dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2017

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari BPS. Data yang dibutuhkan antara lain:

- a. Data laju inflasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun analisis 2007-2017.
- b. Data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada tahun analisis 2007-2017.
- c. Data upah minimum Provinsi Sumatera Utara pada tahun analisis 2007-2017.
- d. Data jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Utara pada tahun analisis 2007-2017

#### **3.3. Model Analisis Data**

##### **3.3.1. Metode Analisis Ekonometrik**

Metode yang digunakan untuk menganalisis Pengaruh Inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan jumlah angkatan kerja terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara dengan tahun pengamatan mulai dari 2007 - 2017, adalah metode analisis ekonometrik.

Penggunaan model ekonometrik dalam analisis struktural dimaksudkan untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel-variabel ekonomi. Analisis struktural bertujuan memahami ukuran kuantitatif, pengujian dan validasi hubungan variabel-variabel ekonomi. Model ekonometrik yang digunakan adalah model regresi linier berganda.

### 3.3.2 Penggunaan Metode Analisis Ekonometrik

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \hat{\beta}_4 X_4 + \varepsilon_i; \dots\dots\dots$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

dimana:

$Y_i$  = Pengangguran Terbuka (juta orang)

$\hat{\beta}_0$  = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3, \hat{\beta}_4$  = Koefisien regresi (statistik)

$X_1$  = Inflasi (persen)

$X_2$  = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

$X_3$  = Upah Minimum Provinsi (juta rupiah)

$X_4$  = Jumlah Angkatan Kerja (juta orang)

$\varepsilon_i$  = Galat (Error term)

### 3.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.4.1 Uji Secara Individu (Uji-t)

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, jumlah angkatan kerja) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (pengangguran terbuka), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$ .

##### a. Inflasi ( $X_1$ )

$H_0 : \beta_1 = 0$  artinya, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

$H_1 : \beta_1 > 0$  artinya, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$  : koefisien regresi

$\beta_1$  : parameter

$S(\hat{\beta}_1)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka.

### **b. Pertumbuhan Ekonomi ( $X_2$ )**

$H_0 : \beta_2 = 0$  artinya, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

$H_1 : \beta_2 < 0$  artinya, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka..

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

$\hat{\beta}_2$  : koefisien regresi

$\beta_2$  : parameter

$S(\hat{\beta}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera utara secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran Terbuka.

### **c. Upah Minimum Provinsi ( $X_3$ )**

$H_0 : \beta_3 = 0$  artinya, UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

$H_1 : \beta_3 > 0$  artinya, UMP berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :



$$t_h = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)}$$

$\hat{\beta}_3$  : koefisien regresi

$\beta_3$  : parameter

$S(\hat{\beta}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya upah minimum provinsi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya upah minimum provinsi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka

#### **d. Jumlah Angkatan Kerja (X4)**

$H_0 : \beta_4 = 0$  artinya, jumlah angkatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

$H_1 : \beta_4 > 0$  artinya, jumlah angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_4 - \beta_4}{S(\hat{\beta}_4)}$$

$\hat{\beta}_4$  : koefisien regresi

$\beta_4$  : parameter

$S(\hat{\beta}_4)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya jumlah angkatan kerja di Indonesia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

### 3.4.2 Uji Secara Simultan ( Uji F)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

- a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_1: \beta_i$  tidak semua nol ,  $i = 1, 2, 3, 4$  berarti variabel bebas secara serempak/keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

- b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak, artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

### 3.4.3 Uji Kebaikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel-variabel bebas. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$  ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya “semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Widarjono, **Ekonomitrika Pengantar dan Aplikasinya**, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal 26

### 3.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.5.1 Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono “multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi”<sup>37</sup>. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai VIF < 10 maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya VIF > 10 maka dianggap ada pelanggaran multikolinearitas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinearitas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari

---

<sup>37</sup> **Ibid**, hal 101

matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinearitasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $< 0,95$  maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi parsial. Cara ini diperoleh dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### 3.5.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, disturbance error) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji  $D - W$ ). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen."<sup>38</sup>

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan:

---

<sup>38</sup> Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2**, Edisi 7, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal 111

- a. Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.5.2.1 Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run. Uji Run merupakan bagian dari statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. "Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)."<sup>39</sup> Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak

### 3.5.3. Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \hat{\beta}_4 X_4 + \varepsilon_i;$$

1. Apakah galat (*disturbance error*) menyebar normal atau tidak
2. tidak terjadi autokorelasi

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji

---

<sup>39</sup> **Ibid** hal 116

t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil."<sup>40</sup> untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

### 1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari ebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

### 2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik,yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjururan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\textit{skewness}}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \quad \text{dan} \quad Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\textit{kurtosis}}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \quad \text{dimana } n$$

adalah ukuran sampel.

---

<sup>40</sup> **Ibid**, hal 154

Menurut Ghozali “uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)”.<sup>41</sup> Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal.

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Pengangguran Terbuka (Y)**

Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka terjadi karena penambahan lowongan kerja lebih rendah dari penambahan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam persen.

#### **2. Inflasi (X1)**

Inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga secara umum dan berlaku dalam periode waktu yang terus menerus di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam persen.

#### **3. Pertumbuhan Ekonomi (X2)**

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan domestik bruto tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam bentuk persen.

---

<sup>41</sup> Ibid hal.158



#### **4. Upah Minimum Provinsi (X3)**

Upah Minimum Provinsi merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam juta rupiah.

#### **5. Jumlah Angkatan Kerja (X4)**

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan dalam juta jiwa.